

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670803 198809 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

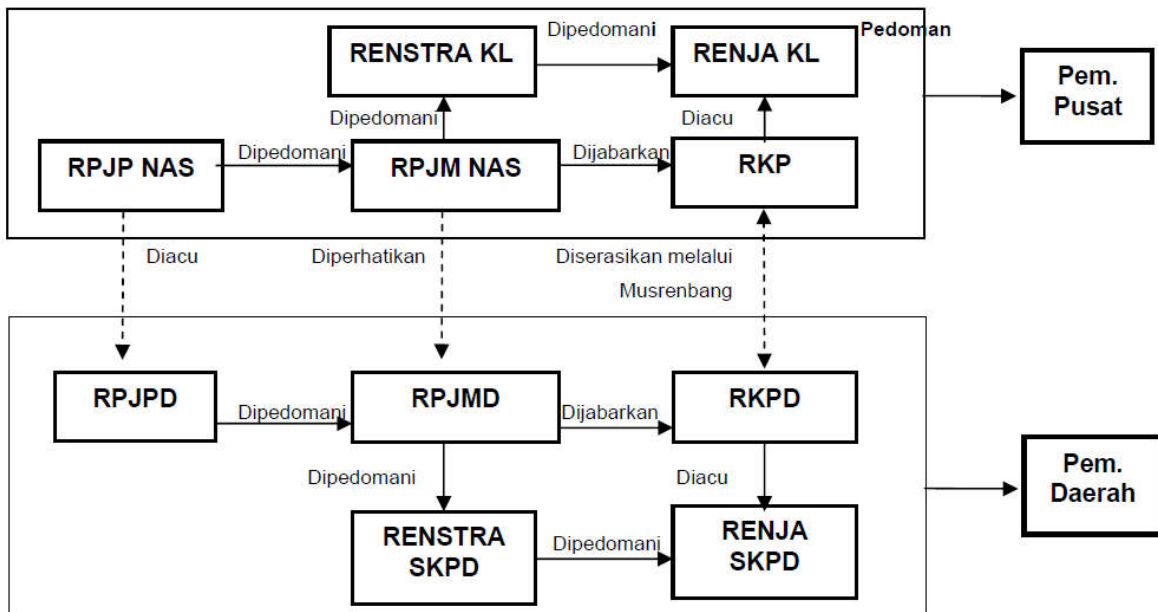
Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Atau dengan kata lain, Rencana Kerja DISKOPERINDAG yang selanjutnya disebut Renja DISKOPERINDAG Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, serta melalui proses mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dari atas ke bawah (top- down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Kedua mekanisme tersebut dilakukan melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan forum OPD Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/Kabupaten/Kota:

KETERKAITAN RENJA DENGAN DOKUMEN RKPD, RENSTRA, RENJA K/L DAN RENJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(Tabel 1)



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 21. Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor : 050/01/437.56/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pada Tahun 2025.
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan perencanaan OPD, dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2025 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah

Kabupaten Gresik.

3. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2025 dan DPA OPD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada Bab I berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
 - 1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
 - 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.
 - 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen
2. Pada Bab II berisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Bab ini memuat kajian

(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Bab ini terdiri dari: evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja pelayanan Perangkatdaerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

3. Pada Bab III berisi uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.
4. Bab IV menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
5. Bab V berisikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025. Pencapaian kinerja terhadap program/kegiatan/subkegiatan dan pendapatan dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan dan Belanja

Anggaran belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. **12.940.773.600** yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. **12.203.0808.625**. dan Belanja Modal Rp. **737.692.975** sedangkan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. **10.730.101.989,98 (82.93)** dan Belanja Modal sebesar Rp. **0 (0)** dari rencana. Dengan demikian, jika Realisasi Pendapatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik TA 2024 adalah sebesar **Rp 2.062.249.771** atau **82,49 %** dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar **Rp 2.500.000.000**. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya yang mencapai **Rp 3.390.981.266**, maka terdapat penurunan realisasi pendapatan sebesar **Rp 1.328.73.495** atau **64,4 %**.

Tabel 2
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2022
1.	PENDAPATAN	4.325.000.000.00	3.806.690.795.00	88.02	3.417.658.471.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.325.000.000.00	3.806.690.795.00	88.02	3.417.658.471.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.325.000.000.00	3.806.258.600.00	88.01	3.416.419.079.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah		402.195.00		1.239.392.00
2.	BELANJA	22.370.819.304.00	20.321.440.131.18	90.84	12.640.502.600.00
2.1	BELANJA OPERASI	22.270.618.934.00	20.221.585.581.18	90.80	12.490.645.100.00
2.1.1.	Belanja Pegawai	8.570.004.000.00	8.185.333.424.00	95.51	8.283.971.976.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.932.614.934.00	5.612.252.157.18	94.60	4.206.673.124.00
2.13	Belanja Hibah	7.768.000.000.00	6.424.000.000.00	82.70	0.00
2.2	BELANJA MODAL	100.200.370.00	99.854.550.00	99.65	149.857.500.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.200.370.00	99.854.550.00	99.65	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-			
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER					
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.045.819.304.00)	(16.614.779.336.18)	91.52	(9.222.844.129.00)

Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan 4 (empat) sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar **Rp. 12.940.773.600,-** dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
GUNA PENCAPAIAN SASARAN

NO	SASARAN	TARGET KEUANGAN 2024	REALISASI 2024 (Rp)	KET. %
1	Meningkatkan pengelolaan Koperasi	10.380.046.000	9.852.253.664	94.92
2	Meningkatnya Usaha Mikro	862.500.000	439.795.162	50.99
3	Meningkatkan sistem distribusi usaha perdagangan	1.440.000.000	336.564.838,00	23.37
4	Meningkatnya Industri Mikro Kecil dan Menengah	250.000.000,00	104.571.686,00	41.83
TOTAL		12.940.773.600,00	10.730.101.989,98	82.92

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 4 (empat) sasaran yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik **SEBESAR 82.92%**

Sedangkan untuk program kegiatan pendukung yang bersifat rutin berada di sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud sebesar Rp. 10.285.046.000 (termasuk gaji dan tunjangan) dan teralisasi sebesar Rp. 9.772.881.173,98 atau 95.02 %.

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peranngkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DISKOPERINDAG s/d Tahun 2022	
					Target Renja PD tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun (n-1) 2023 %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$(8)=(7)/(6)$	9	10	$(11)=(10)/(4)$
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL,DAN MENENGAH									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							20 dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen yang dicetak	-	-	18 dokumen	18 Jenis dokumen	100	18 dokumen	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monev yang dicetak	-	-	175 buku	160 buku	91.43	175 buku	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-					-	-

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2025

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jabatan PNS yang Terfasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjanganya	-	-	86 orang	80 orang	9 3. 0	86 orang	-	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	-	-	151 buku	130 buku	8 6.	151 buku	-	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	7 administrasi			7 administrasi	-	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantro/Rumah tangga	-	-	15 pengadaan	15 pengadaan	1 0 0.	15 pengadaan	-	-

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2025

			Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	-	-	12 bulan	9 bulan	75.00	12 bulan		
			Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan, jumlah penyediaan cetak	-	-	6 jenis cetak	6 jenis cetak	100	21.557 lembar, 6 jenis cetak		
			Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	-	-	5 bahan cetak	4 jenis bacaan	80.00	5 jenis bahan bacaan		
			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah penyediaan souvenir/tali asih	-	-	47 paket	40 paket	85.11	47 paket		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	-	-	69 kali	60 kali	86.96	26 kali, 43 kali		
			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah						-	-	
			Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan			10 jenis pembayaran	10 jenis pembayaran	100	10 jenis pembayaran	-	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62 pemeliharaan			62 pemeliharaan		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah pemeliharaan kendaraan	-	-	8 kendaraan	8 kendaraan	100	8 kendaraan		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan pendukung kerja	-	-	54 unit	50 unit	92.59	54 unit		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN				66.35% (420 koperasi)			66.998% (430 koperasi)		
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah				105 koperasi			110 koperasi		
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	-	-	105 koperasi	100 koperasi	95.24	110 koperasi		
			Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi yang memiliki SOP/SOM Persus, dll	-	-	53 koperasi	50 koperasi	94.34	56 koperasi		
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)				40 koperasi			50 koperasi		

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2025

			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat	-	-	40 koperasi	40 koperasi	100	50 koperasi		
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	-	-	6 koperasi	6 koperasi	100	15 koperasi		
			PROGRAM PELTIHAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									
			Pendidikan dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah							140 koperasi		
			Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah pengurus yang siap mengikuti sertifikasi kompetensi	-	-	270 orang	270 orang	100	280 orang		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							136 koperasi		
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Jumlah koperasi yang difasilitasi	-	-	133 koperasi	133 koperasi	100	30 koperasi pondok pesantren		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO									
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terdata	-	-	1000 usaha mikro	1000 usaha mikro	100	1000 usaha mikro		
			Pemberdayaan melalui kemitraan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi	-	-	84 usaha mikro	-	0	84 usaha mikro		

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2025

			Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi	-	-	253 usaha mikro	250 usaha mikro	98.81	253 usaha mikro		
			Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan akses fasilitasi permodalan	-	-	249 usaha mikro	249 usaha mikro	100	249 usaha mikro		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									

			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang berdaya saing	-	-	70 usaha mikro	70 usaha mikro	100	70 usaha mikro		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								-	-
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								-	-
			Penyedia sarana distribusi perdagangan	Jumlah pengadaan pemenuhan sarana distribusi perdagangan	-	-	6 jenis pengadaan	6 jenis pengadaan	100	6 jenis pengadaan	-	-
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar kabupaten dan sentra PKL yang di pelihara	-	-	8 pemeliharaan	10 pemeliharaan	125.00	8 pemeliharaan	-	-
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								-	-
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang pasar dan sentra PKL yang terfasilitasi	-	-	1.338 stand	1000 stand	74.74	1.338 stand	-	-
			Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi sarana distribusi perdagangan	-	-	17 pasar & sentra PKL	-	-	12 lokasi	-	-
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								-	-
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								-	-
			Pemantuan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha usaha distribusi barang dalam satu	Jumlah pemantauan dalam bahan pokok	-	-	24 bahan pokok	24 bahan pokok	100	24 bahan pokok	-	-
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Jumlah bahan pokok yang diinput di aplikasi Sikaperbapo	-	-	36 bahan pokok	36 bahan pokok	100	36 bahan pokok	-	-

		Pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kab/kota	Jumlah paket dalam pasar murah jumlah pelaksanaan operasi pasar	-	-	1.4000 paket kali regulasi	1.400 paket kali regulasi	100	1.400 paket 2 kali	-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								-	-
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								-	-
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan misi dagang daerah	-	-	1 kali	1 kali	100	1 kali	-	-
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN									
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan									
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera dan tera ulang	-	-	3500 pelaksanaan	3.500 pelaksanaan	100	3.500 pelaksanaan		
		Pengawasan/penyuluhan metrology legal	Jumlah UTTP yang diawasi	-	-	3500 UTTP	3500 UTTP	100	3.500 UTTP		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN									
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri									
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Jumlah IKM yang dibina	-	-	60 IKM	60 IKM	100	60 IKM		
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI									
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha									
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi terkait merk dan halal	-	-	178 IKM	178 IKM	100	178 IKM		
		Kewenangan kab/kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	-			

			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI								
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk								
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi sinas	-	-	150 IKM	150 IKM	100	150 IKM	

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik

No	Indikator	SPM/ Stan dar Nasio nal	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian					Cat atan Ana lisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	Prosentase Koperasi Aktif	-	-	44.17% (625 koperasi)	44.11% (633 koperasi)	44.12 (642 koperasi)	44.20% (642 koperasi)	45.40% (646 Kop)	49.70% (755 koperas) -	51.17% (790 Koperasi)	52.01		-
2	Pertumbuhan Usaha Mikro	-	-	0.09% (150 UM)	0.10% (175 UM)	0.10% (175 UM)	0.10% (175 UM)	0.09%(146 UM)	1.08% (1.859 koperasi)	1.92% (1.165 Usaha Mikro)	33.81		-
1	Pertumbuhan nilai Neraca Perdagangan	-	-	0.03% 1.481.784.855.09 US \$	0.04% 1.546.784.855.09 US \$	0.05% 1.621.784.855.09 US \$	0.05% 1.701.784.855.09 US \$	21.14% 1.734.417.711 US \$	0.06% 2.288.229.997.55 usd	-35.17% (1.483.390.516,58 USD)	33.34		-
2	Pertumbuhan IKM	-	-	0.79% (7389 IKM)	0.81 (7449 IKM)	0.83% (7511 IKM)	0.87% (7576 IKM)	(0.79%) 7389 IKM	0.81% 7.450 ikm	1.02 % (7.511 IKM)	1.14		-

Dari hasil capaian diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua indikator pencapaian kinerja pelayanan tercapai dari target yang ditetapkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tidak terlepas dari permasalahan mauoun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan. Berbagi masalah

maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan terkait dengan perumsan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah koordinator perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bersinergi dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, dunia Usaha dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, IKM dan Sentra Perdagangan Kabupaten Gresik sebagai tujuan utama RPJMD Gresik terwujudnya pembangunan perekonomian. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang diarahkan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem informasi. Penilaian capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2025 dapat dilihat dari peningkatan Pertumbuhan Koperasi Aktif, yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 93,73% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.6
Rencana dan Realisasi
Meningkatnya Koperasi Aktif, Pertumbuhan Usaha Mikro,
Pertumbuhan Neraca Perdagangan dan Pertumbuhan IKM
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2024

No	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	TARGET (SESUAI RPJMD)			REALISASI			
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024
90	KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi aktif tahun n / jumlah koperasi tahun n * 100	45.40 % (646 Koperasi)	49.70% (755 Koperasi)	44.12% (642 Koperasi)	51.17% (790 Koperasi)	49.70% (755 Koperasi)	51.17% (790 Koperasi)	52,01
91	KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Meningkatnya Usaha Mikro	Pertumbuhan usaha mikro	jumlah usaha mikro tahun n - tahun n-1/ tahun n-1 * 100	0,09 % (146 Usaha mikro)	1.08% (1.859 Usaha mikro)	0,10%(175 Usaha mikro)	1.92% (1.165 Usaha Mikro)	1.08% (1.859 Usaha mikro)	1.92% (1.165 Usaha Mikro)	33,81
92	PERDAGANGAN	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (US \$)	jumlah nilai neraca perdagangan tahun n - nilai neraca perdagangan tahun n-1 / nilai neraca perdagangan tahun n-1 *100	21,14 % 1.734.41 7.711 USD	0.06% 2.288.22 9.997.55 USD	0.05% 1.621.78 4.855.09 USD	-35.17% (1.483.39 0.516,58 USD)	0.06% 2.288.22 9.997.55 USD	-35.17% (1.483.390. 516,58 USD)	33,34
93	PERINDUSTRIAN	Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM	Pertumbuhan IKM	Jumlah IKM tahun N - Jumlah IKM Tahun N-1 / Jumlah IKM Tahun N-1 *100	0,79 % (7389 IKM)	(0.81%) 7.450 IKM	(0.83%)7 511 IKM	1.02 % (7.256 IKM)	(0.81%) 7.450 IKM	1.02 % (7.511 IKM)	1,14

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi-Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemetaan permasalahan berdasarkan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yakni :

Tabel 3.1 (T-B 35)
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Banyaknya Pegawai Yang pensiun sehingga berpengaruh terhadap kinerja dinas dikarenakan SDM yang kurang	1. Kualitas SDM Koperasi	Tingkat kualitas SDM Arah Kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro Masyarakat sadar untuk berkoperasi namun kurang memahami perkoperasian
		2. Produktivitas dalam pengembangan usaha	Belum optimal dalam <i>update</i> data Sarana dan prasarana pendukung belum optimal Tingkat kualitas produk Usaha Mikro Kurangnya modal bagi Usaha Mikro Pelaku Usaha Mikro tidak prosedural dalam menjalani bisnisnya

2	Belum optimalnya UTP yang ditera/tera ulang	1. Belum ada data Base UTP yang valid	Belum adanya kepastian jumlah UTP yang ada di wilayah Kabupaten Gresik Terdapat beberapa UTP yang ditera ulang setiap tahunnya berbeda beda
		2. Belum adanya gedung yang sesuai standar Kemetrolgian	Gedung yang ditempati saat ini belum memenuhi standard an syarat kemetrolgian
		3. Tugas pengawasan kemetrolgian belum berjalan dan jumlah petugas yang berterra sah sedikit tidak sebanding dengan UTP yang tersebar di kab. Gresik	Penambahan ruang lingkup pelayanan dan akreditasi membutuhkan gedung yang lebih luas
			Tidak memiliki SDM Pengawas Kemetrolgian

demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Penentuan isu – isu strategis Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dan hasil evaluasi kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan serta tantangan eksternal baik dari lokal / bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional, mengingat Kabupaten Gresik merupakan kota industry terbesar kedua di Indonesia. Isu strategis merupakan kondisi/ keadaan saat

ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan demografi, ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 3.2.

demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisis Gambaran Pelayanan PD	Koperasi aktif menurun	IKK	- Pendampingan Koperasi dalam keaktifan pelaporan - Pengawasan koperasi dalam Pembinaan Kompetensi perkoperasin	- Adanya wabah pandemi yang melanda secara nasional - Kekuatan modal koperasi - Regenerasi koperasi yg belum siap	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan
	Pertumbuhan usaha mikro belum meningkat	IKK	- Pendampingan pelaku usaha mikro - Pelatihan dan Pendampingan	- Adanya wabah pandemi yang melanda secara nasional - Globalisasi perdagangan menyebabkan persaingan akan semakin ketat	- Terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan usaha mikro - <i>Database</i> usaha mikro masih belum sepenuhnya update dan detail
Hasil Analisis	Pertumbuhan Kinerja Usaha Koperasi		Rendahnya kinerja Koperasi	Regulasi bidang koperasi masih belum konsisten	- Masih terbatasnya jumlah tenaga

Renstra K/L dan Renstra Provinsi					perkoperasian yang kompeten
	Penumbuhan Wirausaha Baru		Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru	Paradigma pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kewirausahaan	

3.2. Dampak terhadap Visi, Misi, Bupat Terhadap Capaian Program Nasional

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik akan dibawa untuk berkarya agar konsisten sehingga dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

**“MERWUJUDKAN GRESIK BARU
YANG LEBIH MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN
BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH ”**

Secara filosofi, Visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok Visi pembangunan sebagaimana berikut:

Tabel 3.5

Tabel Perumusan Penjelasan Visi

NO.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1.	Gresik yang lebih Mandiri	Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola

		pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.
2.	Gresik yang Sejahtera	Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.
3.	Gresik yang Berdaya Saing	Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.
4.	Gresik yang Berkemajuan	Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.
5.	Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah	Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang

		karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.
--	--	--

Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan Misi Kabuapten Gresik 2021-2026 yaitu:

Misi 1 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.

Misi 2 :

Membangun infrastruktur yang berdaya saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota

Misi 3 :

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah.

Misi 4 :

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Kharimah.

Misi 5 :

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat Gresik.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik masuk pada Misi ke-3 Kabupaten Gresik yaitu **'Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah** dengan Tujuan ke 3 yaitu **'Menguatkan Pembangunan Perekonomian Grcsik**

Baru yang Inklusif dan indikator kinerjanya yaitu : **Pertumbuhan Ekonomi**
Sedangkan sasaran Kabupaten Gresik yang menaungi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yaitu sasaran ke- 6 yaitu : **'Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah'** dengan indikator kinerja yaitu **Indeks Williamson** yang merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita.

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam lima tahun ke depan dianalisis melalui metode SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Perumusan analisis SWOT tantangan dan peluang Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 3.3
ANALISIS SWOT
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN / STRENGTHS (S)	PELUANG / OPPRTUNITIES (O)
1. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro 2. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain embiz market, media sosial koperasi dan usaha mikro dll. 3. Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti Pasar dan Sentra UKM 4. Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro	1. Pertumbuhan jumlah koperasi dan usaha mikro 2. Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas koperasi dan UM 3. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif 4. Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional dan internasional 5. Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro 6. Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro
1. Kewenangan untuk Pengawasan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 2. Ketersediaan Dasar Hukum, SOP, dan Peraturan lainnya 3. Pelaksanaan Metrologi legal yang bersifat	1. Perkembangan industri dan perdagangan mendukung pertambahan penggunaan dan pertambahan jenis alat ukur 2. Denga pelayanan tera ulang pada pasar mendukung terciptanya Gresik

mandatory mengharuskan setiap pemilik alat ukur meneraulangkan alat ukurnya	menyandang predikat Daerah Tertib Ukur 3. Penambahan ruang lingkup pengujian dapat memperluas jenis pelayanan
KELEMAHAN / WEAKNES (W)	ANCAMAN / THREATS (T)
1. Kualitas dan kuantitas SDM pembina dan pengelola perkoperasian dan usaha mikro yang berkompetensi dibidangnya 2. Belum tersedianya data demografi tentang pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik 3. Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro (Pasar dan Sentra PKL, Pujasera sarana prasarana pendukung yang belum optimal 4. Kualitas produk usaha mikro yang belum optimal untuk bersaing dengan produk usaha lainnya 1. Belum tersedianya data potensi pemilik alat ukur 2. Kurangnya SDM penera dan pengawas Kemetrolagian 3. Belum adanya up grade kompetensi tenaga fungsional kemetrolagian Belum tersentuhnya pelayanan tera/tera ulang alat ukur di pasar tradisional/pasar desa	1. Dinamika perkembangan koperasi dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum 2. Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha baik sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar 3. Pertumbuhan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi – lokasi fasilitas umum dan ruang publik 4. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah yang dapat mengganggu produktifitas dan pemasaran produk usaha mikro 1. Kurangnya kesadaran pemilik alat ukur untuk menerakan alat ukur yang dimiliki 2. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengukuran 3. Semakin sedikitnya pemilik alat ukur yang meneraulangkan alat ukurnya.

2.3.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Perumusan program kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan yang merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2021-2026. Untuk Dinas Koprasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mengemban Nawa Karsa ke 1 yaitu:

GRESIK AKAS dengan satu output kunci Perijinan UMKM tuntas ditingkat kecamatan yang didukung 3 program yaitu :

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)

- Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

GEMA KARYA dengan dua output kunci :

1. 3b (Bela, Beli, Bagi) Gresik didukung 2 program yaitu :
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Program Pengembangan Eksport.
2. One Pesantren one produk (OPOP) didukung 2 program yaitu:
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh **Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan** Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdapat 13 program dan 18 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 11.116.538.363,00,-

Berikut disajikan review terhadap rancangan RKPD tahun 2025 untuk **Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan** Kabupaten Gresik pada tabel **Tabel T-C.31** sebagai berikut :

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

No .	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				12.194.864.252,00	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				13.795.000.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi , Usaha Kecil, dan Menengah				12.194.864.252,00	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan				13.795.000.000,00	
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%	11.194.694.252,00	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%	11.995.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan dan Monev	20 Dokumen	65.000.000,00	Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan dan Monev	18 Dokumen	80.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	40.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	35.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	40.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pembayaran Pemenuhan Administrasi Keuangan Dinas	86 Dokumen	8.298.554.652,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pembayaran Pemenuhan Administrasi Keuangan Dinas	86 Dokumen	8.515.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	8.283.554.652,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	8.500.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	4 laporan	15.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	7 Dokumen	420.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	10 Paket	700.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.000.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	250.000.000,00	
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistic Kantor yang Disediakan	10 Paket	80.000.000,00	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistic Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.000.000,00	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	80.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	100.000.000,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	25.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	15.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	25.000.000,00	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	80.000.000,00	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	150.000.000,00	
--	---	--	---	---------------	---------------	--	--	---	------------	----------------	--

No .	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Pelayanan yang Terbayar	10 Pembayar an	2.266.139.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Pelayanan yang Terbayar	4 laporan	2.400.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	119.039.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	2.200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2.147.100.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	2.200.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeliharaan Seluruh Sarana dan Prasarana Dinas	62 pemelihar aan	145.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeliharaan Seluruh Sarana dan Prasarana Dinas	6 unit	300.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit	200.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	45.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	100.000.000,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Jumlah Koperasi Aktif Grade B, C1, C2, dan D menjadi Koperasi Aktif Grade A	440 Koperasi	40.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Jumlah Koperasi Aktif Grade B, C1, C2, dan D menjadi Koperasi Aktif Grade A	440 Koperasi	150.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	115 Koperasi	40.000.000,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	30 unit usaha	150.000.000,00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	40.000.000,00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	150.000.000,00	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Jumlah KSP/USP Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	414 koperasi	150.000.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Jumlah KSP/USP Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	414 koperasi	300.000.000,00	

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Sehat	60 koperasi	150.000.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Sehat	60 unit usaha	300.000.000,00	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 unit usaha	50.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	60 unit usaha	150.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No .	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	9 unit usaha	100.000.000,00	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	9 unit usaha	150.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Pertumbuhan Omzet Koperasi	2.83%	410.170.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Pertumbuhan Omzet Koperasi	2.83%	500.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dibina	139 koperasi	410.170.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dibina	30 unit usaha	500.000.000,00	

	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Rstrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	410.170.000,00	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Rstrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	500.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Usaha Mikro dengan Akses Permodalan	0.12%	150.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Usaha Mikro dengan Akses Permodalan	0.12%	350.000.000,00	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No .	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan	250 usaha mikro	150.000.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan	1000 dokumen	350.000.000,00	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1000 dokumen	50.000.000,00	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1000 dokumen	100.000.000,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	150 usaha mikro	50.000.000,00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinannya	150 unit usaha	150.000.000,00	

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	259 unit usaha	50.000.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	259 unit usaha	100.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Pertumbuhan Usaha Mikro	1.46%	250.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Pertumbuhan Usaha Mikro	1.46%	500.000.000,00	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Statusnya	30 usaha mikro	250.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang meningkatkan statusnya	75 unit usaha	500.000.000,00	
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	75 unit usaha	250.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	75 unit usaha	250.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.655.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.550.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.305.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.850.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100%	700.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100%	1.700.000.000,00	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah pemeliharaan sarana dan prasaran pasar	8 pemeliharaan	600.000.000,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah pemeliharaan sarana dan prasaran pasar	9 unit	1.500.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 unit	600.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 unit	1.500.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No .	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pembinaan Pedagang	3922 pedagang	100.000.000,00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pembinaan Pedagang	3 dokumen	200.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	100.000.000,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	200.000.000,00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	325.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	500.000.000,00	

	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		jumlah komoditi yang di input dalam https://siskaperbapo.com dalam rangka pemantauan harga bahan pokok dan lainnya	28 bahan pokok	325.000.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		jumlah komoditi yang di input dalam https://siskaperbapo.com dalam rangka pemantauan harga bahan pokok dan lainnya	2 laporan	500.000.000,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 laporan	325.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 laporan	500.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		% Pertumbuhan nilai ekspor	2.84%	100.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		% Pertumbuhan nilai ekspor	2.84%	250.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No .	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang mengikuti Misi dagang	5 UM/IKM	100.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang mengikuti Misi dagang	5 pelaku usaha	250.000.000,00	
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 pelaku usaha	100.000.000,00	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 pelaku usaha	250.000.000,00	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTTP berterra sah	97.34%	180.000.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTTP berterra sah	97.34%	400.000.000,00	

	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTTP yang ditera sah	3500 UTTP	180.000.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTTP yang ditera sah	3500 unit	400.000.000,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat ukur, alat talar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	3500 Pelaksanaan	150.000.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah alat ukur, alat talar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	3500 unit	350.000.000,00	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	2500 orang	30.000.000,00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	2500 orang	50.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				350.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				700.000.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase IKM yang terdata dan terbina	1.1%	150.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase IKM yang terdata dan terbina	1.1%	250.000.000,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terdata	80 IKM	150.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terdata	44 dokumen	250.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkroniasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkroniasi,	44 dokumen	150.000.000,00	Koordinasi, Sinkroniasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkroniasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	44 dokumen	150.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,43%	100.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIA N IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,43%	250.000.000,00	

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mengajukan Merk dan Halal	104 IKM	100.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mengajukan Merk dan Halal	6 dokumen	250.000.000,00	
--	---	--	---	---------	----------------	---	--	---	-----------	----------------	--

	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan atau Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Best Approach (OSS RBA)		Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan atau Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk bidang usaha sector perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah – tinggi, dan tinggi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan OSS RBA, bagi penanamna	6 dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan atau Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Best Approach (OSS RBA)		Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan atau Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk bidang usaha sector perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah – tinggi, dan tinggi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan OSS RBA, bagi penanamna modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah selain bidang usaha	6 dokumen	250.000.000,00	
--	---	--	--	-----------	----------------	---	--	--	-----------	----------------	--

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	1.24%	100.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	1.24%	200.000.000,00	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM ber KBLI kategori industri yang mengajukan verifikasi teknis melalui SIINas	15 IKM	100.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM ber KBLI kategori industri yang mengajukan verifikasi teknis melalui SIINas	25 dokumen	200.000.000,00	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	25 dokumen	100.000.000,00	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	25 dokumen	200.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel **T-C.32** sebagai berikut:

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Table 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Proram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rek.	Program /Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				-
2 17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %	-
2 17	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev	20 dokumen	-
2 17 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis dokumen yang di cetak	18 jenis dokumen	-
2 17 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen monev yang dicetak	175 buku	-
2 17	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-
2 17 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jabatan pns yang terfasilitasi pembayaran gaji dan tunjanganya	86 orang	-

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2025

2	17	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen pelaporan yang dicetak	151 buku	-
2	17	Administrasi Umum Perangkat Daerah			jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 administrasi	-
2	17	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik, Kebomas	jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga	15 pengadaan	-
2	17	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	-
2	17	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-
2	17	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	5 jenis bahan bacaan	-
2	17	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan souvenir/talih asih dinas	47 paket	-
2	17	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah perjalanan dinas dalam jumlah perjalanan luar daerah	26 kali 43 kali	-
2	17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-
2	17	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Kebomas, Kebomas	jumlah pembayaran jasa pelayanan	10 jenis pembayara	-
2	17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			jumlah pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana dinas	62 pemeliharaan	-
2	17	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pemeliharaan kendaraan	5 kendaraan	-
			Jabatan	Kelurahan			-
2	17	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pemeliharaan peralatan pendukung kerja	54 unit	-
2	17	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	66.98 %	-
2	17	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Koperasi yang diperiksa & diawasi	110 kopera	-
2	17	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	110 koperasi	-
2	17	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	52.60 %	-

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2025

2	17	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang di nilai	50 Koperasi	-
2	17	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koperasi Sehat	50 koperasi
2	17	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan	15 koperasi
2	17		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Omzet Koperasi	2.79 %	-
2	17		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yg di bina	130 Koperasi	-
2	17	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang difasilitasi usahanya	136 koperasi
2	17		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0.12 %	-
2	17		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro yang diberdayakan	250 UM	-
2	17	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha mikro yang terdata	500 Usaha mikro
2	17	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perizinannya	50 Usaha mikro
2	17	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50 Usaha Mikro
2	17		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro	1.35 %	-
2	17		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat statusnya	30 UM	-
2	17	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usaha mikro yang berdaya saing	70 Usaha Mikro
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			-
3	30		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			-
3	30		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-
K o d e			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	-
			Lokasi		Target 2025	-
						-

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2025

3	30	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pasar kabupaten dan sentra pkI yang di pelihara	8 pemeliharaan	-
3	30		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah pembinaan pedagang	3922 pedagang	-
3	30	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pedagang pasar dan sentra pkI yang terfasilitas	1338 stand	-
3	30		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	inflasi 3 %	-
3	30		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		jumlah komoditi yang di input dalam https://siskaperbapo.co dalam rangka pemantauan harga bahan pokok dan lainnya	28 bahan pokok	-
3	30	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan pokok yang diinput di aplikasi Siskaperbapo	36 bahan pokok	-
3	30		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Pertumbuhan nilai ekspor	2.59 %	-
3	30		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang mengikuti Misi dagang	5 UM/IKM	-
3	30		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pelaksanaan misi dagang daerah	1 misi dagang	-
3	30		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTTP berterra sah	97.34 %	-
3	30		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTTP yang ditera sah	3000 UTTP	-
3	30	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan tera dan terra ulang	3500 pelaksanaan	-
3	30	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah UTTP yang diawasi	3500 UTTP	-
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				-
3	31		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Prosentase IKM yang terdata dan terbina	0,98 %	-
3	31		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang terdata	70 IKM	-
3	31	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM yang dibina	70 IKM	-
3	31		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,39 %	-
3	31		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang mengajukan Merk dan Halal	150 IKM	-

3	31	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi terkait Merk dan Halal	150 IKM	-
3	31		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,93 %	-
3	31		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM ber KBLI kategori industri yang mengajukan verifikasi teknis melalui SIINas	151 IKM	-
3	31	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi SIINas	150 IKM	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan adalah rangkain prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang su

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang tata cara dan Pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi 3. Permen KUKM RI Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperas 4. Permen KUKM RI Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah oleh Koperasi;	Kewenangan Pembinaan, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

2.	Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan Urusan Perindustrian	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274). 2. Peraturan Perundang-undangan Nomor 20/2016 Tahun 2010 Tentang Merk 3. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 04/MPP/KEP/4/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan IKM serta Pedagang Kecil dan Menengah 4. Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HK.KU.02.02-87 Tanggal 06 Agustus 2018 Tentang Pemberlakuan Sistem Pembayaran PNBPK Kekayaan Intelektual (SIMPAKI).	Pelayanan fasilitasi Merk dan Halal Penerapan Perindustrian setiap usaha yang sudah mendaftarkan usahanya ke Online Single Submission (OSS) mempunyai kewajiban memenuhi komitmen untuk aktifasi Ijin Usaha Industrinya. Salah satu komitmen tersebut adalah mempunyai akun SIINas
		5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2010 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Klaster.	
		6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/2/2010 Tahun 2010 Tentang Pemberian bantuan Peralatan dan atau Mesin. 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas),	

3	Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan Urusan Perdagangan	1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.	Fasilitasi pengembangan ekspor Penerbitan Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal)
		1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP	Pelayanan penyelenggaraan Metrologi Lega Tera/Tera Ulang

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merujuk pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran ini harus memberikan kontribusi untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah menetapkan visi pembangunan yang sekaligus menjadi visi pemerintah kabupaten pada periode 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan periode 2021-2026, yaitu:

- (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;
- (2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah;
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Sesuai Tupoksi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ikut bertanggung jawab dalam mendukung **misi ketiga** Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah”**. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan tujuan dari misi ketiga RPJMD 2021-2026 dimana Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan ada di dalamnya yaitu **“Menguatkan pembangunan perekonomian**

Gresik Baru yang inklusif". Sementara sasaran pembangunan Kabupaten Gresik 2021- 2026 yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik adalah **sasaran ke-enam**, yaitu ***"Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor Antar Wilayah"***. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pengolaan koperasi, Usaha Mikro dan sebagai pusat promosi dan informasi produk-produk unggulan;
2. Mewujudkan sentra-sentra industri potensial dan meningkatnya unit usaha IMKM yang produktif dengan produk IMKM berbasis inovatif ;
3. Peningkatan sistem distribusi dan Pengawasan Peredaran Barang/Jasa demi terwujudnya Perlindungan Konsumen serta Penguatan sektor ekspor impor.

B. Sasaran

Untuk mewujudkan Koperasi Usaha Mikro serta Industri Perdagangan sebagai penggerak Ekonomi yang Tanggung ditetapkan empat sasaran strategis:

1. Meningkatnya Pengelolaan Koperasi
2. Meningkatnya Usaha Mikro
3. Meningkatnya sistem distribusi perdagangan
4. Meningkatkan dan mengembangkan poroduk-produk kerajinan IKM

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas maka ditentukan indikator sasaran

sebagai berikut:

1. Persentase Koperasi aktif
2. Perentase Pertumbuhan Usha Mikro
3. Persentase Pertumbuhan nilai neraca perdagangan
4. Persentase Pertumbuhan IKM

Tabel 3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran					
		Target Kinerja					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	44.17% 625 Kop	44.11% 663 Kop	44.12% 642 Kop	44.20% 642 Kop	44.35% 663 Kop	44.50% 684 Kop
Meningkatnya Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0.09% 150 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM	0.10% 175 UM
Meningkatnya Sistem Distribusi Usaha Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan US \$	0.03% 1.481784 .855.09 USD	0.04% 1.546.78 9.855.09 USD	1.621.784 .855.09 USD	1.701.784 .855.09 USD	1.786.784 .855.09 USD	1.795.284 .055.09 USD
Meningkatkan dan mengembangkan produk-produk IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	0.79% 7389 IKM	0.81% 7449 IKM	0.83% 7511 IKM	0.87% 7576 IKM	0.92% 7716 IKM	0.97% 7646 IKM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya adalah dirumuskan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan kebijakan ini merupakan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Gresik Tahun 2025 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu :

Visi : ***Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah***

Misi ke 3 : ***Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;***

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik pada tahun 2025 terdapat 14 program dan 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 11.116.538.363,-

Berikut ini tabel rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Dlinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 sebagai berikut:.

Table 2.7 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PAJAK YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN PASAR				12.194.864.252,00				13.795.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.194.864.252,00				13.795.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD		100%	11.194.694.252,00			100%	11.995.000.000,00
	Perencanaan,penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan dan Monev		20 Dokumen	65.000.000,00			18 Dokumen	80.000.000,00

Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Gresik Tahun 2025

	Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Dokumen	40.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Laporan	40.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Pemenuhan Administrasi Keuangan Dinas		86 Dokumen	8.298.554.652,00			86 Dokumen	8.515.000.000,00
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Orang/bulan	8.283.554.652,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		86 Orang/bulan	8.500.000.000,00

	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan /triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	15.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		7 Dokumen	420.000.000,00			10 Paket	700.000.000,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	250.000.000,00
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistic Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Paket	150.000.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	100.000.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	25.000.000,00

	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	25.000.000,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Laporan	150.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan yang Terbayar		10 Pembayaran	2.266.139.600,00			4 Laporan	2.400.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	119.039.600,00			4 laporan	200.000.000,00
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	2.147.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 laporan	2.200.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Seluruh Sarana dan Prasarana Dinas		62 pemeliharaan	145.000.000,00			6 unit	300.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 unit	2000.000.000,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 unit	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 unit	100.000.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi Aktif Grade B, C1, C2, dan D menjadi Koperasi Aktif Grade A		440 Koperasi	40.000.000,00			440 koperasi	150.000.000,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi		115 Koperasi	40.000.000,00			30 unit usaha	150.000.00,00
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 unit usaha	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 unit usaha	150.000.000,00
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Jumlah KSP/USP Koperasi yang Dinilai Sehatannya		414 koperasi	150.000.000,00			414 koperasi	300.000.000,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat		60 koperasi	150.000.000,00			60 unit usaha	300.000.000,00

	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 unit usaha	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 unit usaha	150.000.000,00
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 unit usaha	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 unit usaha	150.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	% Pertumbuhan Omzet Koperasi		2.83%	410.170.000,00			2.83%	500.000.000,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dibina		139 koperasi	410.170.000,00			30 unit usaha	500.000.000,00
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 unit usaha	410.170.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 unit usaha	500.000.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Persentase Usaha Mikro dengan Akses Permodalan		0.12%	150.000.000,00			0.12%	350.000.000,00

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan		250 usaha mikro	150.000.000,00			1000 dokumen	350.000.000,00
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1000 dokumen	100.000.000,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 usaha mikro	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 unit usaha	150.000.000,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259 unit usaha	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		259 unit usaha	100.000.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro		1.46%	250.000.000,00			1.46%	500.000.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Statusnya		30 usaha mikro	250.000.000,00			75 unit usaha	500.000.000,00
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 unit usaha	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 unit usaha	500.000.000,00

	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.655.000.000,00				3.550.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.305.000.000,00				2.850.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Dipelihara		100%	700.000.000,00			100%	1.700.000.000,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar		8 pemeliharaan	600.000.000,00			9 unit	1.500.000.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua	9 unit	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		9 unit	1.500.000.000,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Pedagang		3.922 pedagang	100.000.000,00			3 dokumen	200.000.000,00
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua	3 dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		3 dokumen	200.000.000,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Perubahan IHK perbulan (Indeks Harga Konsumen)		3%	325.000.000,00			3%	500.000.000,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang Diinput dalam https://siskaperbapo.com dalam Rangka Pemantauan		28 bahan pokok	325.000.000,00			2 laporan	500.000.000,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 laporan	325.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	500.000.000,00

	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	% Pertumbuhan Nilai Ekspor		2.84%	100.000.000,00			2.84%	250.000.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang Mengikuti Misi Dagang		5 UM/IKM	100.000.000,00			5 pelaku usaha	250.000.000,00
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 pelaku usaha	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		5 pelaku usaha	250.000.000,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP berterra sah		97.34%	180.000.000,00			97.34%	400.000.000,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera sah		3500 UTTP	180.000.000,00			3500 unit	400.000.000,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3500 unit	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3500 unit	350.000.000,00
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2500 orang	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2500 orang	50.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				350.000.000,00				700.000.000,00

	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang Terdata dan Terbina		1,1%	150.000.000,00			1.1%	250.000.000,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Terdata		80 IKM	150.000.000,00			44 dokumen	250.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 dokumen	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44 dokumen	250.000.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase IKM yang Mendapat Fasilitas		1.43%	100.000.000,00			1.43%	250.000.000,00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Mengajukan Merk dan Hala		104 IKM	100.000.000,00			6 dokumen	250.000.000,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Tkenis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 dokumen	250.000.000,00

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM ber KBLI Kategori Industri yang Telah Verifikasi Teknis Melalui SIINas		1.24%	100.000.000,00			1,24%	200.000.000,00
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM ber KBLI Kategori Industri yang Telah Verifikasi Teknis Melalui SIINas		15 IKM	100.000.000,00			25 dokumen	200.000.000,00
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Dokumen	200.000.000,00
	Jumlah				13.849.864.252,00				17.345.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Table 2.8
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan
Perdagangan

No Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)	
					2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.194.864.252,00	13.795.000.000,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.194.864.252,00	13.795.000.000,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE KETERCAPAIAN SASARAN PROGRAM OPD	100%	11.194.694.252,00	11.995.000.000,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan dan Monev	20 Dokumen	65.000.000,00	80.000.000,00
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	30.000.000,00	40.000.000,00
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	35.000.000,00	40.000.000,00

2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pembayaran Pemenuhan Administrasi Keuangan Dinas	86 Dokumen	8.298.554.652,00	8.515.000.000,00
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	8.283.554.652,00	8.500.000.000,00
2.17.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	7 Dokumen	420.000.000,00	700.000.000,00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.000.000,00	250.000.000,00
2.17.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistic Kantor yang Disediakan	10 Paket	80.000.000,00	150.000.000,00
2.17.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	80.000.000,00	100.000.000,00
2.17.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	15.000.000,00	25.000.000,00
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	15.000.000,00	25.000.000,00
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	80.000.000,00	150.000.000,00
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Pelayanan yang Terbayar	10 Pembayaran	2.266.139.600,00	2.400.000.000,00

2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	119.039.600,00	200.000.000,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	2.147.100.000,00	2.200.000.000,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemeliharaan Seluruh Sarana dan Prasarana Dinas	62 pemeliharaan	145.000.000,00	300.000.000,00
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit	100.000.000,00	200.000.000,00
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	45.000.000,00	100.000.000,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Jumlah Koperasi Aktif Grade B, C1, C2, dan D menjadi Koperasi Aktif Grade A	440 Koperasi	40.000.000,00	150.000.000,00
2.17.04.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	115 Koperasi	40.000.000,00	150.000.00,00
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	40.000.000,00	150.000.000,00

2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Jumlah KSP/USP Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	414 koperasi	150.000.000,00	300.000.000,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Sehat	60 koperasi	150.000.000,00	300.000.000,00
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	60 unit usaha	50.000.000,00	150.000.000,00
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	9 unit usaha	100.000.000,00	150.000.000,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		% Pertumbuhan Omzet Koperasi	2.83%	410.170.000,00	500.000.000,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dibina	139 koperasi	410.170.000,00	500.000.000,00
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 unit usaha	410.170.000,00	500.000.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Persentase Usaha Mikro dengan Akses Permodalan	0.12%	150.000.000,00	350.000.000,00

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan	250 usaha mikro	150.000.000,00	350.000.000,00
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1000 dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	150 unit usaha	50.000.000,00	150.000.000,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	259 unit usaha	50.000.000,00	100.000.000,00

2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Pertumbuhan Usaha Mikro	1.46%	250.000.000,00	500.000.000,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Statusnya	30 usaha mikro	250.000.000,00	500.000.000,00
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	75 unit usaha	250.000.000,00	500.000.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.655.000.000,00	3.550.000.000,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.305.000.000,00	2.850.000.000,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana Perdagangan yang Dipelihara	100%	700.000.000,00	1.700.000.000,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	8 pemeliharaan	600.000.000,00	1.500.000.000,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 unit	600.000.000,00	1.500.000.000,00
3.30.03.2.01	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pembinaan Pedagang	3.922 pedagang	100.000.000,00	200.000.000,00
3.30.03.2.01.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase Perubahan IHK perbulan (Indeks Harga Konsumen)	3%	325.000.000,00	500.000.000,00

3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Komoditi yang Diinput dalam https://siskaperba.go.com dalam Rangka Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Lainnya	28 bahan pokok	325.000.000,00	500.000.000,00
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 laporan	325.000.000,00	500.000.000,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		% Pertumbuhan Nilai Ekspor	2.84%	100.000.000,00	250.000.000,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang Mengikuti Misi Dagang	5 UM/IKM	100.000.000,00	250.000.000,00
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 pelaku usaha	100.000.000,00	250.000.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Alat UTTP berterra sah	97.34%	180.000.000,00	400.000.000,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah UTTP yang ditera sah	3500 UTTP	180.000.000,00	400.000.000,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3500 unit	150.000.000,00	350.000.000,00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2500 orang	30.000.000,00	50.000.000,00

3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				350.000.000,00	700.000.000,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN		Prosentase IKM yang Terdata dan Terbina	1,1%	150.000.000,00	250.000.000,00
2.21.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Terdata	80 IKM	150.000.000,00	250.000.000,00
2.21.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	44 dokumen	150.000.000,00	250.000.000,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Prosentase IKM yang Mendapat Fasilitas	1.43%	100.000.000,00	250.000.000,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang Mengajukan Merk dan Halal	104 IKM	100.000.000,00	250.000.000,00
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Tkenis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	6 dokumen	100.000.000,00	250.000.000,00
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Prosentase IKM ber KBLI Kategori Industri yang Telah Verifikasi Teknis Melalui SIINas	1.24%	100.000.000,00	200.000.000,00

3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah IKM ber KBLI Kategori Industri yang Telah Verifikasi Teknis Melalui SIINas	15 IKM	100.000.000,00	200.000.000,00
3.31.04.2.01	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	25 dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana kerja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik ini, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkup Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT);
3. Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun yang sama;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						11.116.538.363,00							14.125.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.688.565.189,00							11.475.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						10.688.565.189,00							11.475.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %			100 %	10.221.024.307,00						100 %	10.490.000.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev	-			20 dokumen	35.090.316,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	15.090.316,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.646.369.690,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	7.710.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	7.641.369.690,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		7.700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				8 Laporan	5.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	167.694.769,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-	-	235.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	47.327.875,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan an	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	30.826.900,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan an	-		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	34.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	0,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	55.539.994,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.265.997.032,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	2.400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				14 Laporan	71.017.600,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	2.194.979.432,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		2.300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	105.872.500,00			-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	85.410.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	20.462.500,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	15.306.725,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	15.306.725,00			-	P5 - Pemba ngunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegrita s Pengemba ngan ekonomi kreatif dan peningkata n kapasitas fiskal Daerah didukung k emudahan, kesederhan aan, dan ketepatan pelayanan investasi	-	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				5 Unit Usaha	15.306.725,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P5 - Pemba ngunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegrita s Pengemba ngan ekonomi kreatif dan peningkata n kapasitas fiskal Daerah didukung k emudahan, kesederhan aan, dan ketepatan pelayanan investasi	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-			-	61.403.258,00						-	170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	61.403.258,00			-	P5 - Pemanfaatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-	-	170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				15 Unit Usaha	17.464.095,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P5 - Pemanfaatan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	-		85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	43.939.163,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P5 - Pemba ngunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegrita s Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-	85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	85.904.993,00						-	315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	85.904.993,00			-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemer ntahan Desa Pengemba ngan ekonomi kreatif dan peningkata n kapasitas fiskal Daerah didukung k emudahan, kesederhan aan, dan ketepatan pelayanan investasi	-	-	315.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				25 Unit Usaha	38.000.378,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P7 - Pemba ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Pemer ntahan Desa Pengemba ngan ekonomi kreatif dan peningkata n kapasitas fiskal Daerah didukung k emudahan, kesederhan aan, dan ketepatan pelayanan investasi	-		85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				150 Unit Usaha	43.264.615,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P7 - Pempa ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Peme ri ntahan Desa Pengemba ngan ekonomi kreatif dan peningkata n kapasitas fiskal Daerah didukung k emudahan, kesederhan aan, dan ketepatan pelayanan investasi	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				50 Unit Usaha	4.640.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P7 - Pempa ngunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberday aan Peme ri ntahan Desa Pengemba ngan ekonomi kreatif dan peningkata n kapasitas fiskal Daerah didukung k emudahan, kesederhan aan, dan ketepatan pelayanan investasi	-		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	304.925.906,00						-	450.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						314.364.475,00							2.150.000.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	129.332.375,00						-	1.550.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	121.450.619,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi Pengemba ngan ekonomi kreatif dan peningkata n kapasitas fiskal Daerah didukung k emudahan, kesederhan aan, dan ketepatan pelayanan investasi	-	-	1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	121.450.619,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG P ERDAGANGAN- PENUGASAN	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi Pengemba ngan ekonomi kreatif dan peningkata n kapasitas fiskal Daerah didukung k emudahan, kesederhan aan, dan ketepatan pelayanan investasi	-		1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	7.881.756,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	7.881.756,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	70.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	70.000.000,00			-	P4 - Pempa ngunan Infr astruktur P engembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pengentas an kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	-	-	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				24 Laporan	70.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Pempa ngunan Infr astruktur P engembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Pengentas an kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-			-	30.500.000,00						-	150.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.500.000,00			-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

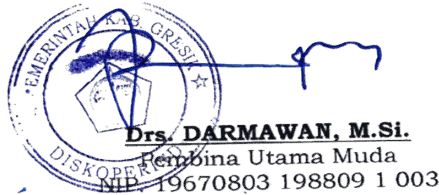
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	30.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-			-	84.532.100,00						-	350.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	84.532.100,00			-	P4 - Pempa ngunan Infr astruktur P engembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-	-	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3500 Unit	66.368.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Pempa ngunan Infr astruktur P engembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				2500 Orang	18.163.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Pempa ngunan Infr astruktur P engembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta penge mbangan Smart Gov ernance berbasis satu data pembangun an	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						113.608.699,00							500.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	53.174.975,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	53.174.975,00			-	P4 - Pemba ngunan Infr astruktur P engembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Peningkata n kesejahte raan sektor agropolitan dan minapolitan	-	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				25 Dokumen	53.174.975,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Pemba ngunan Infr astruktur P engembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Peningkata n kesejahte raan sektor agropolitan dan minapolitan	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-			-	31.263.875,00						-	200.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	31.263.875,00			-	P4 - Pemba ngunan Infr astruktur P engembang an Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Peningkata n kesejahte raan sektor agropolitan dan minapolitan	-	-	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				7 Dokumen	31.263.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	29.169.849,00						-	150.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	29.169.849,00			-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan	-	-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				10 Dokumen	29.169.849,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	P4 - Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	JUMLAH							11.116.538.363,00							14.125.000.000,00	

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003